



PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Sub Bagian Pengelolaan Keuangan  
dan BMN



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM BANTEN 648999  
(SEKRETARIAT JENDERAL / 013.01)**

Laporan Keuangan  
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal  
31 Desember 2022

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran





## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BANTEN  
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang  
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210  
Laman: banten.kemenkumham.go.id,  
Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.i

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran



TEJO HARWANTO  
NIP 196603291990031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp99.982.225,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.598.879.937,- atau mencapai 98,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.666.424.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp61.286.299.923,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp42.880.302,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp60.528.995.982,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp714.423.639,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.639.585,- dan Rp61.260.660.338,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.129.824,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp16.304.655.331,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp16.282.525.507,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp52.212.816,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp16.230.312.691,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp60.600.209.777,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp16.230.312.691,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp87.841.740,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.978.604.992,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp61.260.660.338,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
(013.01)  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-22		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	99.982.225	-	26.634.112
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>99.982.225</b>	<b>0,00</b>	<b>26.634.112</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	9.227.782.000	9.174.506.067	99,42	9.088.817.658
Belanja Barang	B.4	6.106.147.000	6.093.443.520	99,79	6.409.428.698
Belanja Modal	B.5	1.332.495.000	1.330.930.350	99,88	1.552.808.967
Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16.666.424.000</b>	<b>16.598.879.937</b>	<b>99,59</b>	<b>17.051.055.323</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



## II. NERACA

### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.01) NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 *(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	31-Des-21
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C.1	42.880.302	45.568.001
Jumlah Aset Lancar		<b>42.880.302</b>	<b>45.568.001</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2	44.142.991.000	44.142.991.000
Peralatan dan Mesin	C.3	14.578.112.066	16.718.066.426
Gedung dan Bangunan	C.4	17.638.852.063	17.641.554.564
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C.5	109.218.442	109.218.442
Konstruksi dalam pengerjaan	C.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(15.940.177.589)	(18.060.359.246)
Jumlah Aset Tetap		<b>60.528.995.982</b>	<b>60.551.471.186</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.8	7.750.000	-
Aset Lain-Lain	C.9	3.296.881.676	9.800.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(2.590.208.037)	(6.629.410)
Jumlah Aset Lainnya		<b>714.423.639</b>	<b>3.170.590</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>61.286.299.923</b>	<b>60.600.209.777</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN		-	-
Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.11	25.639.585	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>25.639.585</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>25.639.585</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.12	61.260.660.338	60.600.209.777
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>61.260.660.338</b>	<b>60.600.209.777</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>61.286.299.923</b>	<b>60.600.209.777</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
(013.01)  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-22	31-Des-21
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	22.129.824	8.764.343
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>22.129.824</b>	<b>8.764.343</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	9.174.506.067	9.088.817.658
Beban Persediaan	D.3	235.943.992	482.341.488
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.312.745.010	4.232.485.601
Beban Pemeliharaan	D.5	2.043.328.000	1.355.288.545
Beban Perjalanan Dinas	D.6	535.704.937	508.929.400
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.002.427.325	1.225.024.265
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>16.304.655.331</b>	<b>16.892.886.957</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(16.282.525.507)</b>	<b>(16.884.122.614)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	3.800.000
Surplus / defisit kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	52.212.816	14.069.769
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>52.212.816</b>	<b>17.869.769</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(16.230.312.691)</b>	<b>(16.866.252.845)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(16.230.312.691)</b>	<b>(16.866.252.845)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN  
(013.01)  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	60.600.209.777	30.751.031.791
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.230.312.691)	(16.866.252.845)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(87.841.740)	218.392.311
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLAS		-	(68.861.317)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(87.841.740)	287.253.628
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.978.604.992	46.497.038.520
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS	E.4	660.450.561	29.849.177.986
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	<b>61.260.660.338</b>	<b>60.600.209.777</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S- 308/PB/2020 tanggal 9 April 2020 Hal: Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19;
11. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S- 369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 Hal: Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 Hal: Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal

- Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SEK-KU.01.01-206 tanggal 3 Agustus 2020 Hal: Tindak Lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK.KU.01.01-81 Hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 Hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta pelaksanaan rekonsiliasi;
  16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-32/PB/PB.6/2022 tanggal 10 Agustus 2022 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2022;
  17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2022 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Semester II Tahun 2022
  18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 Hal Jadwal Rekonsiliasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (Unaudited).

#### **A.2.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)**

##### *Profil dan Rencana Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, salah satunya adalah provinsi Banten yang bertempat di Jalan Brigjen Syamun No.44 Kel. Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Awal Kantor Wilayah dibentuk pada tahun 1982 diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 Tahun

1982 yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kanwil Kemenkumham terdiri dari 4 (empat) divisi yang terdiri dari :

1. Divisi Administrasi

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

2. Divisi Pemasarakatan

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan

3. Divisi Keimigrasian

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membawahi 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 9 (sembilan) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 3 (tiga) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

Salah satu ciri khas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah terletak pada bangunan gedung JDI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang menyerupai bangunan Belanda karena pada arsitektur pintu dan jendelanya yang sejak awal pembangunan tidak pernah diganti dan dipertahankan sampai saat ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Rencana strategis Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dimaksud.

## **A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

### **A. Visi**

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (business ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

#### **B. Misi**

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen



administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta

- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

### C. **Nilai**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

#### 5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

### **D. Tujuan**

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain,

- pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
  - e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
  - f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Ham Banten (013.01) Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) adalah 1 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W*

No	Kode Wil	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satk
			K	K	D	T	
1	2900	Kantor Wilayah Kementerian	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

*Basis Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

• **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

## *Aset*

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang



didasarkan pada kondisi masing- masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tabel. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
  - barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
  - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
  - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya.

- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
  - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
  - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:
    - a. Tanah,
    - b. Gedung dan bangunan, dan
    - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
      - 1) Jalan dan Jembatan
      - 2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan

Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah penancangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

## *Penyusutan Aset Tetap*

### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset*

#### **e. Aset Lainnya**

## Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### *Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah



tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Sampai dengan Semester II TA 2022, *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01)* sudah 14 kali mengadakan revisi DIPA yaitu :

1. Revisi DIPA Ke 1 pada tanggal 15 Desember 2022 yaitu Pembukaan Blokir
2. Revisi DIPA ke 2 pada tanggal 15 Februari 2022 yaitu Revisi Halaman 3 Dipa
3. Revisi DIPA ke 3 pada tanggal 10 Maret 2022 yaitu revisi Kegiatan Kepegawaian
4. Revisi DIPA ke 4 pada tanggal 11 April 2022 yaitu Optimalisasi Listrik
5. Revisi DIPA ke 5 pada tanggal 28 April 2022 yaitu ABT Belanja Modal Gedung PKK
6. Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 13 Mei 2022 yaitu Revisi Hal 3 Dipa
7. Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 29 Juni 2022 yaitu Revisi Belanja Modal
8. Revisi DIPA ke 8 pada tanggal 13 Juli 2022 yaitu Revisi Halaman 3 Dipa
9. Revisi DIPA ke 9 pada tanggal 04 Agustus 2022 yaitu Revisi Belanja Modal
10. Revisi DIPA ke 10 pada tanggal 08 September 2022 yaitu Revisi Kegiatan Kehumasan
11. Revisi DIPA ke 11 pada tanggal 19 September 2022 yaitu Revisi Penyelesaian Kelebihan Belanja Pegawai
12. Revisi DIPA ke 12 pada tanggal 05 Oktober 2022 yaitu revisi halaman 3 Dipa
13. Revisi DIPA ke 13 pada tanggal 14 Oktober 2022 yaitu revisi Anggaran Belanja Tambahan Listrik
14. Revisi DIPA ke 14 pada tanggal 20 Oktober 2022 yaitu revisi

halaman 3 Dipa

15.Revisi DIPA ke 15 pada tanggal 24 Nopember 2022 yaitu revisi operasional kantor

16.Revisi DIPA ke 16 pada tanggal 02 Desember 2022 yaitu revisi pergeseran Dipa Blokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

17.Revisi DIPA ke 17 pada tanggal 19 Desember 2022 yaitu revisi pemutahiran pergeseran output kegiatan

18.Revisi DIPA ke 18 pada tanggal 21 Desember 2022 yaitu revisi pemutahiran pergeseran output kegiatan

19.Revisi DIPA ke 19 pada tanggal 23 Desember 2022 yaitu revisi

Sehingga rincian DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	9.375.629.000	9.227.782.000
Belanja Barang	6.309.186.000	6.106.147.000
Belanja Modal	324.684.000	1.332.495.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.009.499.000</b>	<b>16.666.424.000</b>

Kanwil Kemenkumham Banten 648999 mendapat anggaran ABT sebanyak 2 kali yaitu Belanja Modal untuk rehab exGedung PKK sebanyak Rp1.030.107.000 dan Belanja Barang untuk kegiatan Operasional sebesar Rp 254.432.000,- dan terdapat pengurangan belanja pegawai sebesar Rp147.847.000,- karena terdapat indikasi kelebihan belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2022.

### *Realisasi*

### **B.1 Pendapatan**

*Pendapatan  
Rp99.982.225,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.99.982.225,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) berasal dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2022

Uraian	2022		
	ANGGARAN	Realisasi	Realisasi
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	47.769.409	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	6.508.165	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	45.704.651	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>99.982.225</b>	<b>-</b>

Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) terdiri dari :

1. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 47.769.409,- terdiri dari :
  - Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Januari sd Desember 2022 sebesar Rp12.774.409,- ,
  - Pendapatan Sewa Gedung Bangunan berupa Kantin selama 3 tahun Rp5.700.000,-
  - Pendapatan Sewa Wisma berupa Bangunan Rumah Prestasi selama 3 tahun Rp 29.295.000,-
2. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp6.508.165,- merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yaitu pengembalian An. Angki Setyo yang kenaikan pangkatnya dibatalkan karena masih menjalani hukuman disiplin sebesar Rp4.908.237,- dan Pengembalian Tunjangan Istri An. Andri Dwi P sebesar Rp1.599.928,-
3. Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp45.704.651,- yaitu pengembalian belanja modal akibat dari audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal

No. ITJ.KP.04.01.I-02 Tanggal 04 Januari 2022 temuan terhadap belanja modal tahun anggaran 2021 dengan rincian :

1. Pengembalian Pemasangan Kaca Tampered Ruang Pelayanan Hukum dan Ham Terpadu dengan Nomor Kontrak W12.PB.02.09-328 nilai Pekerjaan Rp199.571.900,- dan nilai Pengembalian Rp12.663.547,-
2. Pengembalian Pemasangan Kaca Tampered Ruang Divisi Administrasi dengan Nomor Kontrak W12.PB.02.09-338 nilai Pekerjaan Rp128.431.410,- dan nilai Pengembalian Rp3.350.490,-
3. Pengembalian Pekerjaan Rehab Rumah dinas (6 unit) dengan Nomor Kontrak W12.PB.02.09-288 nilai Pekerjaan Rp199.284.713,- dan nilai Pengembalian Rp19.750.014,-
4. Pengembalian Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Para Kepala Divisi dengan Nomor Kontrak W12.PB.02.09-467 nilai Pekerjaan Rp176.000.000,- dan nilai Pengembalian Rp9.940.600,-

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	Naik/turun %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	3.800.000	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	47.769.409	8.588.706	456,19
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	175.637	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	6.508.165	2.051.500	217,24
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.277.000	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	45.704.651	10.741.269	325,51
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>99.982.225</b>	<b>26.634.112</b>	<b>275,39</b>

dibandingkan dengan TA 2021 realisasi pendapatan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 275,39 % hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan beberapa pengembalian belanja TAYL akibat dari pemeriksaan inspektorat tahun anggaran 2021.

## Realisasi

### B.2 Belanja

Belanja Negara  
Rp  
16.598.879.937,-

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp16.598.879.937,- atau 99,59% dari anggaran belanja sebesar Rp16.666.424.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.227.782.000	9.212.851.881	99,84
Belanja Barang	6.106.147.000	6.093.443.520	99,79
Belanja Modal	1.332.495.000	1.330.930.350	99,88
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>16.666.424.000</b>	<b>16.637.225.751</b>	<b>99,82</b>
Pengembalian	-	38.345.814	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.666.424.000</b>	<b>16.675.571.565</b>	<b>100,05</b>

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 2,65% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan turunnya anggaran pada tahun anggaran 2022 ini.

#### Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.174.506.067	9.088.817.658	0,94
Belanja Barang	6.093.443.520	6.409.428.698	(4,93)
Belanja Modal	1.330.930.350	1.552.808.967	(14,29)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.598.879.937</b>	<b>17.051.055.323</b>	<b>(2,65)</b>

## Belanja

### B.3 Belanja Pegawai

#### Pegawai

Rp9.174.506.067

,-

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.174.506.057,- dan Rp9.088.817.658,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,94% dari TA 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai dibandingkan tahun sebelumnya dan banyaknya pegawai yang menduduki jabatan fungsional sehingga tunjangan-pun ikut meningkat.

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS	8.926.806.881	8.810.455.008	1,32
Belanja Pegawai dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	286.045.000	279.990.000	2,16
Belanja Vakasi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>9.212.851.881</b>	<b>9.090.445.008</b>	<b>3,48</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>38.345.814</b>	<b>1.627.350</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>9.174.506.067</b>	<b>9.088.817.658</b>	<b>0,94</b>

#### Belanja

#### Barang Rp

6.093.443.520

,-

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.093.443.520,- dan Rp6.409.428.698,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 4,93% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh turunya anggaran belanja barang non operasional, Belanja Jasa, dan belanja persediaan konsumsi.

#### Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.575.704.437	1.564.467.048	0,72
Belanja Barang Non Operasional	482.182.200	884.588.926	(45,49)
Belanja Jasa	1.237.116.373	1.679.534.250	(26,34)
Belanja Pemeliharaan	2.042.743.000	1.355.288.545	50,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	535.704.937	508.929.400	5,26
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	219.992.573	416.620.529	(47,20)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.093.443.520</b>	<b>6.409.428.698</b>	<b>(4,93)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.093.443.520</b>	<b>6.409.428.698</b>	<b>(4,93)</b>

*Belanja Modal* **B.5 Belanja Modal**

*Rp*

*1.330.930.350*

*,-*

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.330.930.350,- dan Rp1.291.230.350,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada TA 2022 Kanwil Banten 648999 terdapat belanja modal yaitu :

1. Belanja Modal Peralatan Mesin berupa pembelian alat penghacur kertas, LCD Projector, Layar LCD, AC Split, TV, Sound system, Microphone, Stabilisator, Camera Digital, Laptop, Printer, Scener senilai Rp264.735.000,-,
2. Belanja Modal Peralatan Mesin berupa pembelian alat kesehatan untuk pembuatan klinik.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa :  
Pembangunan Pengembangan nilai aset yaitu Gedung Kantor Kanwil Banten senilai Rp1.026.495.350,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	301.235.000	141.881.800	112,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.029.695.350	1.410.927.167	(27,02)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.330.930.350</b>	<b>1.552.808.967</b>	<b>(14,29)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.330.930.350</b>	<b>1.552.808.967</b>	<b>(14,29)</b>

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi belanja modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar 14.29 % hal ini disebabkan menurunnya anggaran belanja modal karena



turunnya anggaran belanja modal dari tahun sebelumnya.

### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp301.235.000,- dan Rp141.881.800,-. Pada TA 2022 satker 648999 memiliki belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian alat penghacur kertas, LCD Projector, Layar LCD, AC Split, TV, Sound system, Microphone, Stabilisator, Camera Digital, Laptop, Printer, Scener senilai Rp264.735.000,- dan pembelian alat kesehatan untuk pendirian klinik di kanwil kemenkumham Banten sebesar Rp36.500.000,-. Dibandingkan dengan TA 2021 realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 112.31%.

*Perbandingan Realisasi  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Peralatan mesin	301.235.000	141.881.800	112,31
Peralatan Komputer	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>301.235.000</b>	<b>141.881.800</b>	<b>112,31</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>301.235.000</b>	<b>141.881.800</b>	<b>112</b>

### **B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.029.695.350,- dan Rp1.159.722.104,-. Pada TA 2022 satker 648999 terdapat belanja modal gedung dan bangunan berupa Pembangunan Pengembangan nilai aset yaitu Gedung Kantor Kanwil Banten

senilai Rp1.029.695.350,-

Dibandingkan dengan TA 2021, belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 11.49% dikarenakan pada TA 2022 hanya ada belanja penambahan nilai gedung dan bangunan saja terhadap gedung exPKK dan tahun sebelumnya gedung kantor Kanwil sebagian sudah ada beberapa bagian yang dibangun.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.029.695.350	1.410.927.167	(27,02)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.029.695.350</b>	<b>1.410.927.167</b>	<b>(27,02)</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.029.695.350</b>	<b>1.410.927.167</b>	<b>(27,02)</b>

Persediaan  
Rp42.880.302,-

## PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp42.880.302,- dan Rp45.568.001,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel  
Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	42.880.302	45.568.001
Barang untuk Pemeliharaan		
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
<b>Jumlah</b>	<b>42.880.302</b>	<b>45.568.001</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap  
Rp60.528.995.982,-

### C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Setjen (648999) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp60.528.995.982,- dan Rp60.551.471.186,-.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten Setjen (648999) berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah  
Rp44.142.991.000

#### C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.142.991.000,- dan Rp44.142.991.000,-. Tanah seluas 3.560.m2 yang terletak di Jl. Brigjen KH Syamun No. 44 D Serang, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten sudah bersertifikat senilai Rp 15.191.357.000,- dan

terdapat penambahan asset tetap tanah seluas 4.350m<sup>2</sup> senilai Rp28.951.634.000,- tanah tersebut merupakan tanah ex gedung PKK yang sudah digabungkan dengan tanah gedung utama kemenkumham Banten pada tahun 2020.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

*Tabel*  
*Rincian Mutasi Tanah*

*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>Rp44.142.991.000,-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	-
<b>Pembelian</b>	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
<b>Revaluasi Aset</b>	-
<b>Penghapusan</b>	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp44.142.991.000,-</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022</b>	<b>Rp 2.586.187.994,-</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp41.556.803.006,-</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel*  
*Rincian Tanah TA 2022*

*(dalam rupiah)*

<b>No.</b>	<b>Luas</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nilai</b>
<b>1</b>	3.560. m <sup>2</sup>	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D	15.191.357.000
<b>2</b>	4.350. m <sup>2</sup>	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D (ex Gedung PKK)	28.951.634.000
<b>Jumlah</b>			<b>44.142.991.000</b>

*Peralatan dan Mesin*  
*Rp14.578.112.066,-*

### **C.2.2. Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp14.578.112.066,- dan Rp16.718.066.426,-

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>16.718.066.426</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembelian</b>	287.993.000
<b>Hibah</b>	112.500.000
<b>Transfer Masuk</b>	495.918.611
<b>Koreksi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Transfer Keluar</b>	(593.324.850)
<b>Penghentian aset dari penggunaan</b>	(2.443.041.121)
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>14.578.112.066</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022</b>	(13.109.133.817)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.468.978.249</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian alat penghacur kertas, LCD Projector, Layar LCD, AC Split, TV, Sound system, Microphone, Stabilisator, Camera Digital, Laptop, Printer, Scener dll senilai Rp287.993.000;

Hibah alat podcast senilai Rp112.500.000.

Transfer Masuk peralatan kantor antara lain workstation, camera digital, PC unit, Laptop dan Printer senilai Rp495.918.611,-

Transfer keluar senilai Rp593.324.850,- terdiri dari 1 unit sedan senilai Rp174.895.450,- , 3 unit minibus senilai Rp401.189.400,- dan 2 Unit Laptop senilai Rp17.240.000,-

Penghentian aset dari penggunaan senilai -Rp2.443.041.121,- terdiri dari 511 item peralatan mesin (daftar terlampir)

Gedung dan Bangunan  
Rp17.638.852.063

### **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.638.852.063 dan Rp17.641.554.564.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel*

*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2022*

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>17.641.554.564</b>
Koreksi Pencatatan	(188.385.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(45.704.651)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	542.897.857
Pengembangan Melalui KDP	675.182.493
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(844.040.555)
Transfer Keluar	(142.652.645)

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>17.638.852.063</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022</b>	(2.819.521.272)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>14.819.330.</b>

Koreksi Pencatatan senilai Rp -188.385.000,- terdiri dari koreksi Bangunan Gedung tertutup permanen senilai (Rp122.912.000,-) dan Bangunan Gedung Garasi / Pool Lainnya senilai (Rp64.473.000,-)

Koreksi Pencatatan nilai berkurang sebesar (Rp45.704.651,-) terdiri dari Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rp25.954.637,-) Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (Rp11.377.781) dan Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen (Rp8.372.000,-).

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah berupa koreksi pencatatan Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp542.897.857,-

Pengembangan melalui KDP merupakan Pengembangan Pembangunan Gedung Kantor Lainnya senilai Rp675.182.493,-

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan berasal dari Gedung dan Bangunan Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen sebanyak 7 unit yang kondisinya rusak akibat banjir, senilai (Rp733.899.555,-) dan Pagar Permanen senilai (Rp 110.141.000,-)

Transfer Keluar berasal dari transfer keluar gedung dan bangunan berupa rumah negara golongan I Tipe C Permanen senilai (Rp142.652.645)

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp109.218.442,-

### **C.2.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp109.218.442,- dan 109.218.442,-.

Mutasi Aset tetap lainnya per tanggal pelaporan sebagai berikut :

<b>Saldo per 01 Januari 2021</b>	<b>109.218.442</b>
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 September 2021</b>	<b>109.218.442</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2021	(11.522.500)
<b>Nilai Buku per 30 September 2021</b>	<b>97.695.942</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp15.940.177.589,-

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.940.177.589,- dan Rp18.060.359.246,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

*Tabel*  
*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
*(dalam rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.578.112.066	13.109.133.817	1.468.978.249
2.	Gedung dan Bangunan	17.638.852.063	2.819.521.272	14.819.330.791
3.	Aset Tetap Lainnya	109.218.442	11.522.500	97.695.942
	<b>Jumlah</b>	<b>32.326.182.571</b>	<b>15.940.177.589</b>	<b>16.386.004.982</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.4. Aset Lainnya  
Rp714.423.639,-

### C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp714.423.639,- dan Rp3.170.590,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud  
Rp7.750.000,-

#### C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp7.750.000,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun

mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel*  
*Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Taransfer masuk</b>	7.750.000
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>7.750.000</b>
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2022</b>	968.750
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>6.781.250</b>

Mutasi tambah:

Transfer masuk dari ditjen AHU berupa aplikasi penatausahaan digitalisasi dokumen AHU senilai Rp7.750.000,-.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel*  
*Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Penatausahaan digitalisasi dok AHU	7.750.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>7.750.000,-</b>

*Aset Lain-Lain*

*Rp3.296.881.676,-*

#### **C.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp3.296.881.676,- dan Rp9.800.00,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) .

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel*  
*Rincian Mutasi Aset Lain-lain*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021</b>	<b>9.800.000</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Reklasifikasi dari Aset Tetap</b>	3.287.081.676
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penggunaan kembali BMN yang dihentikan</b>	-
<b>Penghapusan BMN</b>	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>3.296.881.676</b>
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2022</b>	(2.589.239.287)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>707.642.386</b>



Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari reklasifikasi 510 item yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp3.296.881.676,-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp2.590.208.037,-)*

#### **C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp2.590.208.037) dan (Rp6.629.410,-). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel  
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2022*

*(dalam rupiah)*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1.	Software	7.750.000	968.750	6.781.250
	<b>Jumlah</b>	<b>7.750.000</b>	<b>968.750</b>	<b>6.781.250</b>
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	3.296.881.676	2.589.239.287	707.642.389
	<b>Jumlah</b>	<b>3.296.881.676</b>	<b>2.589.239.287</b>	<b>707.642.389</b>
	<b>Total</b>	<b>3.304.631.676</b>	<b>2.590.208.037</b>	<b>714.423.639</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp25.639.585,-*

#### **C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp25.639.585,- dan Rp0,-.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel  
Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022*

*(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
<b>Sewa Kantin selama 3 Tahun (14 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2025)</b>	4.176.186,-

<b>Sewa Wisma Rumah Prestasi (14 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2025)</b>	21.463.399,-
<b>Jumlah</b>	<b>25.639.585,-</b>

*Ekuitas*

*Rp61.260.660.338*

### **C.7 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp61.260.660.338,- dan Rp60.600.209.777,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNBP  
Rp22.129.824,-*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.129.824,- dan Rp8.764.343,- pendapatan tersebut merupakan pendapatan Negara bukan pajak.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	22.129.824	8.764.343	152,50
<b>Jumlah</b>	<b>22.129.824</b>	<b>8.764.343</b>	<b>152,50</b>

Pendapatan LO Kanwil Kemenkumham Banten (013.01) berasal dari Pendapatan sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas sebesar Rp12.774.409,- sewa kantin dan sewa Wisma Pengayoman Kanwil Banten(Rumah Prestasi) yang dibayar dimuka sebesar Rp9.355.415,-. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai PNBP pada LRA dan nilai akun-akun terkait pengakuan PNBP secara akrual pada neraca tidak terdapat selisih.

*Beban Pegawai  
Rp9.174.506.067,-*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.174.506,- dan Rp Rp9.088.817.658,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan 0,94 % dari tahun anggaran sebelumnya.

*Rincian Beban Pegawai  
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	8.888.461.067	8.808.827.658	0,90
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	286.045.000	279.990.000	2,16
<b>Jumlah</b>	<b>9.174.506.067</b>	<b>9.088.817.658</b>	<b>0,94</b>

### **D.3 Beban Persediaan**

*Beban Persediaan  
Rp235.943.992,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp235.943.992,- dan Rp482.341.488,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan*

*31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Des-22	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	235.943.992	482.341.488	- 51,08
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>235.943.992</b>	<b>482.341.488</b>	<b>- 51,08</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp3.312.745.010,-*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.312.745.010,- dan Rp 4.232485.601,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :  
Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2021
Beban Keperluan	1.397.615.385,		1.115.804.448
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh			
Beban Honor Operasional Satuan	125.950.000,		151.550.000
Beban Barang Operasional Lainnya	23.046.600,		281.919.100
Beban barang Ops	18.180.000,		-
Beban Bahan	316.657.600,		459.116.721
Beban Honor Output	43.600.000,		65.680.000
Beban Barang Non	121.924.600,		202.696.615
Beban Barang Non			157.095.590
Beban Langganan	199.260.373,		328.437.696
Beban Langganan	2.300.000,		5.241.931
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.912.452,		15.193.500
Beban Sewa	916.080.000,		1.378.700.000
Beban Jasa Konsultan			27.500.000
Beban Jasa Profesi	10.000.000,		17.850.000
Beban Jasa lainnya	90.700.000,		25.700.000
Beban Jasa Penanganan Pademmi Covid	18.776.000,		-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17.742.000,		
<b>JUMLAH</b>	<b>3.312.745.010</b>	<b>0</b>	<b>4.232.485.601</b>
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>3.312.745.010</b>		

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp2.043.328.000,-*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.328.000,- dan Rp1.355.288.545,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	Pengembalian Belanja	TH 2021
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	867.298.000,	-	620.453.495
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya		-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus		-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.175.445.000,	-	734.835.050
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	585.000,	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang		-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan		-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.043.328.000</b>	<b>-</b>	<b>1.355.288.545</b>

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>A</b>	<b>Beban Pemeliharaan LO</b>	<b>2.043.328.000</b>
<b>B</b>	<b>Belanja Pemeliharaan LRA ( Akun 523xxx )</b>	<b>2.042.743.000</b>
<b>C</b>	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	585.000
<b>D</b>	Beban Persediaan Suku Cadang	-
<b>E</b>	<b>Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO ( c + d )</b>	<b>2.043.328.000</b>
<b>F</b>	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	<b>867.298.000</b>
<b>G</b>	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	<b>1.175.445.000</b>
<b>H</b>	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-
<b>I</b>	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	-
<b>J</b>	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	-
<b>K</b>	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	-
<b>L</b>	<b>Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Beban Pemeliharaan Total = b + e - l</b>	<b>2.043.328.000</b>
	<b>Selisih ( a - m )</b>	585.000

Terdapat selisih antara LRA dan LO sebesar Rp 585.000,-  
Selisih tersebut merupakan beban persediaan untuk

pemeliharaan yaitu pembelian box cointaner. Kesalahan penggunaan kode barang pada saat pembuatan surat perintah bayar yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp535,704.937,-*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp353.704.937,- dan Rp508.929.400,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	Pengembalian Belanja	TH 2021
Beban Perjalanan Biasa	513.804.937,		476.579.400
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.900.000,	-	32.350.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>535.704.937</b>	<b>-</b>	<b>508.929.400</b>

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp1.002.427.325,-*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah



masing-masing sebesar Rp1.002.427.325,- dan Rp561.533.730,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2022	Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan mesin	515.416.057,	645.707.706
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	463.175.575,	317.569.168
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.866.943,	576.471
Beban Penyusutan Amortisasi Software	968.750,	
Beban Penyusutan Lisensi		
Beban Penyusutan Aset Lainnya		
Beban Penyusutan Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional		
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional		
<b>Jumlah</b>	<b>1.002.427.325</b>	<b>963.853.345</b>

*Surplus Pelepasan  
Aset Non Lancar  
Rp0,-*

#### **D.8 Surplus Pelepasan Aset Non Lancar**

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten 648999 merupakan pendapatan hasil Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk

periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp3.800.000,- .

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp52.212.816,-*

#### **D.9 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp52.212.816,- dan Rp17.869.769,-.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### *Ekuitas Awal*

*Rp.60.600.209.777,-*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.600.209.777,- dan Rp30.751.031.791,-.

### *Defisit LO*

*Rp16.230.312.691,-*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 30 September 2021 adalah sebesar Rp12.856.364.378,- dan Rp16.866.252.845,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Koreksi Nilai Aset*

*Tetap Non*

*Revaluasi*

*(Rp87.841.740,-)*

### **E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 30 September 2021 adalah sebesar (Rp87.841.740,-) dan Rp 218.392.311,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Terdapat koreksi atas reklasifikasi sebesar (Rp87.841.740,-) terdiri dari Rp45.704.651,- merupakan koreksi akibat temuan inspektorat jenderal pekerjaan TA 2021, dan Rp42.137.089,- merupakan koreksi dari akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan aset tetap.

### *Transaksi Antar*

*Entitas*

*Rp16.978.604.992,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

adalah masing-masing sebesar Rp16.978.604.992,- dan Rp46.497.038.520,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.051.055.323,
Diterima dari Entitas Lain	-26.634.112,
Transfer Keluar	60.695.377,
Transfer Masuk	29.087.921.932,
Pengesahan Hibah Langsung	324.000.000,
<b>Jumlah</b>	<b>46.497.038.520</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp26.634.112,-) sedangkan DKEL sebesar Rp17.051.055.323,-.

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.908.7921.932,- dan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp60.695.377,-).

*Ekuitas Akhir*  
*Rp60.763.012.916,-*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp60.763.012.916,- dan Rp61.044.250.140,-.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

Semenjak pertama kali diumumkan adanya penyebaran Coronavirus (Covid-19) oleh China di penghujung tahun 2019, yang mana penyebaran virus tersebut berawal dari kasus lokal, Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal ataupun melalui transmisi lokal antar penduduk.

Konfirmasi telah menyebarnya Covid-19 di Indonesia, diawali dengan pengumuman oleh Pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020, bahwa telah terdapat temuan 2 (dua) kasus positif Covid-19. Semenjak itu pertumbuhan kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Dengan melihat data penyebaran Covid-19 yang sangat luas ke seluruh dunia, maka pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO), mengumumkan bahwa dunia telah mengalami Pandemi Covid-19, dan mengarahkan agar negara-negara terjangkau mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menangani Pandemi Covid-19 tersebut.

Pemerintah Pusat telah memerintahkan kepada Menteri, Kepala Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara lainnya untuk menyusun langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19, tak terkecuali dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sampai dengan bulan September 2022 realisasi belanja dalam rangka covid19 Kanwil Kemenkumham Banten 648999 sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KET
521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid 19	22020130 1001798	1.680.00 0	- Masker Sensi Convex	

		22020130 1001798	4.602.99 0	Obat-obatan penanganan Covid-19 - Anadex Drage - Spirasin - Indexon - Zegavit - Prove - Santa - Methylprednisolone - Azithromycin - OBH Nelco - Ambroxol - Sanmol	
		22020130 1004753	1.479.00 0	- Masker Sensi Duckbill - Masker Sensi Convex	
		22020130 1005421	5.400.00 0	- Masker Sensi KF 94	
522192	Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	22020130 1001798	6.318.00 0	- Swab test pegawai	
		22020130 1002214	1.185.00 0	- Swab test pegawai	
		22020130 1002786	1.100.00 0	- Swab test pegawai	
		22020130 1003297	275.000	- Swab test pegawai	
		22020130 1009817	409.000	- Swab test pegawai	
		22020130 1000742	684.000	- Swab test pegawai	
		22020130 1000201	6.930.00 0	- Swab test pra rekon	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid- 19	22020130 1000340	7.200.00 0	-Aplikasi Zoom Meeting	

### **F.3 PENGUNGKAPAN LAIN LAIN**

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 008401002645307  
Nama Rekening : BBPG020 KNWL HUKUM DAN HAM  
BANTEN 648999  
Nama Bank : BRI CABANG SERANG  
Surat Izin : S-223/WPB.11/KP.020/2015  
Tanggal : 17-02-2015

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-03 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2022, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 :

KPA : Tejo Harwanto

PPK : Agus Suryana

dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-02 Tahun 2021 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran :

Bendahara : Khoirunissa

Tetapi terjadi perubahan / pergantian bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Nomor W12.270.KU.03.03 Tahun 2022. Bendahara : Hafin Jaya Wardana

2. Rincian Capaian Kinerja sampai dengan Desember 2022 untuk DIPA Setjen Kanwil Banten antara lain :



1. Layanan Perkantoran Kanwil telah dilaksanakan 100 %
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal telah dilaksanakan 100 %
3. Layanan Umum telah dilaksanakan 100 %
4. Layanan Sarana Internal telah dilaksanakan 100 %
5. Layanan Prasarana Internal telah dilaksanakan 100 %
6. Layanan SDM telah dilaksanakan 100%
7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal telah dilaksanakan 100 %
8. Layanan Kehumasan dan Protokoler telah dilaksanakan 100%
9. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal telah dilaksanakan 100 %
10. Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah dilaksanakan 100%.
11. Layanan Dukungan Manajemen Satker telah dilaksanakan 100 % .
12. Layanan Perkantoran telah dilaksanakan 100%.